



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

OPTIMALISASI PENGINTEGRASIAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI YANG DILAKUKAN PERUBAHAN MELALUI PENYUSUNAN DALAM SATU NASKAN DAN PENEMPATANNYA DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NAMA : DR. MAHARANI SOFIATY, SH, M.HUM

N I P : 19800330 200801 2 001

N D H : 04

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek Perubahan Optimalisasi Pengintegrasian Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan Perubahan melalui Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Satu Naskah dan Penempatannya pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini berisikan sejumlah milestones yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan serta untuk mengetahui historikal perubahan yang dilakukan sehingga mempermudah setiap orang untuk membaca, menemukan serta memahami peraturan perundang-undangan.

Pengintegrasian yang dilakukan pada milestone jangka pendek Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan Perubahan melalui Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Satu Naskah ditujukan terlebih dahulu terhadap jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengingat jumlah Peraturan Menteri jumlahnya lebih banyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan terlebih dahulu membentuk dasar hukum dengan melakukan revisi Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Sehingga memiliki daya paksa bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) naskah sebelum ditetapkan. Selain itu juga, membuat uji petik terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan Perubahan yang melibatkan para stake holder di bagian perundang-undangan unit kerja agar dapat memahami penyusunan dalam 1 (satu) naskah tersebut.

Sedangkan pengintegrasian yang dilakukan pada milestone jangka menengah dan jangka panjang yaitu melakukan sosialisasi, menindaklanjuti penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang penyusunannya dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan bagian peraturan perundang-undangan unit kerja sebelum rancangan peraturan perundang-undangan tersebut disampaikan ke Biro Hukum untuk di periksa secara finalisasi dan penempatannya pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal.